

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP**

Jl. KH. Mansyur No. 71, Telp. (0328) 662635 Sumenep



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP
Tahun 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmad Allah SWT kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang disesuaikan dengan sistematika Penyusunan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Ketentuan dimaksud, memiliki dua fungsi yaitu pertama disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan urusan serta sumber daya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, yang Kedua merupakan perwujudan pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai jaminan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat serta sebagai informasi mengenai Penerapan Manajemen Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2018, terhadap Rencana Kerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan pada tahun keempat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Disamping itu, dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, tentu tidak lepas adanya kerja sama para stakeholders dan komitmen pihak yang terkait, yaitu Tim Asistensi BPKP Provinsi Jawa Timur, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja serta pengukuran peningkatan kinerja dalam pelayanan publik bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk Akuntabilitas yang dipercayakan, serta diharapkan upaya perbaikan bersama secara berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep dimasa yang akan datang dengan Motto "**Super Mantap**".

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LAKIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggung jawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yang lebih baik.

Sumenep, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMENEP

Drs. KOESMAN HADIE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600627 198103 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan terselenggaranya Good Governance dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya dalam percepatan pembangunan dibidang Teknologi Informatika. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban daerah yang tepat dan jelas serta nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib, menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian yang terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi serta strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pembangunan Komunikasi dan Informasi tentu akan terwujud dan termotifasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan serta inovasi yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan perbaikan kinerja ditahun yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKJIP Tahun 2018 ini, mudah-mudahan dengan terselaikannya laporan LAKJIP ini bisa menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menjadi Instansi yang transparansi dan berakuntabilitas, dalam pembangunan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika terimakasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN –LAMPIRAN	43

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjalankan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pedoman dimaksud, disusun dengan tujuan agar dapat dipakai sebagai bahan untuk membantu penyusunan sistem pengukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah mampu mengembangkan misinya. Hal ini diwajibkan bagi instansi penyelenggara pemerintahan guna mendorong tercapainya kemampuan mengelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan jawaban yang berisi penjelasan mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai media informasi untuk mengetahui sejauh mana peran Penyelenggara Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya di era otonomi daerah terhadap rencana dan kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam program kegiatan kinerja tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merespon setiap kebijakan baru Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, sistematika penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya penyusunan laporan ini untuk memberikan ulasan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditargetkan dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian terhadap kebijakan rencana tahunan 2018 yang ditargetkan dilakukan evaluasi pengukuran keberhasilan capaian kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja menggunakan metode skala ordinal, sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Yang tentunya dilakukan perbaikan melalui proses yang berkelanjutan dalam menajerial pemerintahan daerah.

Hal ini nantinya akan memberikan dampak adanya peningkatan kinerja disetiap tingkatan organisasi atas Penetapan Target Kinerjanya selama satu tahun berlangsung yang dilakukan secara konsisten dan integral tidak lepas dari Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 yang dijabarkan melalui Program Tahunan Pemerintah Daerah RKPD kemudian dituangkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai target Rencana Kerja yang ditetapkan sehingga mempermudah mengukur kinerjanya disetiap sasaran program /kegiatannya nantinya diharapkan mampu mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah, kondisi terakhir yang seharusnya terwujud sebagai upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 47 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sekamin mutlak diperlukan pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan yang dituntut untuk lebih baik dan terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin , diperlukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang lebih bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk maksud tersebut setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azaz sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), seluruh instansi pemerintahan baik pusat atupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung

jawaban instansi pemerintahan dalam mencapai misi dan misi tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (Stakeholders).

Berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2017. Selain itu penyusunan LAKIP ini merupakan tindak lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketaatan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja Instansi. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian siklus terhadap tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen sekurang-kurangnya meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi Kabupaten Sumenep terletak di JL. KH. MANSYUR NO. 71 letaknya berdekatan dengan Lapangan Terbang Trunojoyo Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur, terletak pada posisi 113° 32'54" - 116° 16'48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

Geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Bagian daratan luasnya 1.146,93 km² atau sekitar 54,79% dari wilayah Kabupaten Sumenep, Bagian daratan terdiri atas delapan belas kecamatan dan satu pulau di Kecamatan Dungkek. Sedangkan wilayah kepulauan luasnya 946,53 km²

atau sekitar 45,21% dari luas wilayah Kabupaten Sumenep, meliputi 126 buah pulau. Sebagaimana wilayah Pulau Madura pada umumnya, merupakan wilayah kering dan pegunungan, Kabupaten Sumenep bagian utara mulai Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk dan Batuputih sebagian besar terdiri dari lahan kering. Temperatur di Kabupaten Sumenep rata-rata 24,7°C - 33,6°C.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 27 kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken, Pasongsongan dan Batuputih.

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Komunikasi dan Informasi, Persandian Dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKJIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LAKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep bertujuan Untuk :

- 1. Memperoleh Informasi mengenai kinerja selama satu tahun anggaran.*
- 2. Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.*
- 3. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.*

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, Statsitik Dan Persandian Daerah yang berbasis Elektronik serta tugas lain yang diberikan oleh Bapak Bupati Sumenep. Adapaun Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Sebagai Berikut :

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika ;
2. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi;
3. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pelayanan Informasi ;
4. Pelaksanaan Pengaman Informasi Daerah dan penyediaan data Statistik Daerah ;
5. Pelaksanaan Pengaman Informasi Daerah dan Persandian Daerah ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKERTARIAT

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya ;
- b) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan
- c) Mengelola dan menganalisa serta memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta pelaksanaan keamanan, kebersihan kantor, dan proses kedudukan hukum kegiatan ;
- d) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian, surat menyurat serta tata kelola kearsipan ;
- b. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas ;

- c. Menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Laporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengumpulkan Perencanaan Program Kerja dan pelaksanaan kegiatan serta anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan perencanaan dan pelaksanaan program Kegiatan serta laporan kinerja ;
- c. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dibidang keuangan ;
- b. Menyusun dan menghimpun data rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha pengelolaan keuangan ;
- c. Menyusun, meneliti dan mengevaluasi keabsahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta mengamankan dokumen keuangan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi dan Tugas :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi;
- b. Pelaksanaan forum kehumasan, penerangan tatap muka, media centre, media massa, elektronik dan tradisional, pameran ;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan kelompok komunikasi ;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin film, rekaman video dan permainan elektronik ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi Publik Terdiri dari

1) Seksi Komunikasi Sosial

- a. Menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan penerangan dan sosialisasi program dan penyelenggaraan pemerintahan melalui media penerangan mobile dan pemutaran film ;
- b. Menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan komunikasi dan hubungan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan melalui pameran dan pertunjukan rakyat ;
- c. Melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui siaran keliling ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi komunikasi social ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kemitraan Dan Kerjasama Media

- a. Menyusun program kerja dan melaksanakan diseminasi informasi melalui pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local ;
- b. Menyusun program kerja dan melaksanakan layanan komunikasi public dan citra positif pemerintah daerah melalui pembuatan konten local ;
- c. Mengadakan koordinasi dengan lembaga komunikasi publik, lembaga keprofesian terkait komunikasi dan informasi serta lembaga komunikasi pemerintah ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kemitraan dan kerjasama media ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Sosial

- a. Menyusun program kerja dan melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik
- b. Menyusun program kerja dan melaksanakan layanan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM), Forum Koordinasi Kehumasan (FKK) dan Telecenter
- c. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi terhadap lembaga komunitas komunikasi strategis di masyarakat ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan komunitas social ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG INFORMASI PUBLIK

Bidang Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika. Mempunyai tugas Melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi, penyebarluasan informasi, melaksanakan tugas analisa dan kajian informasi publik, serta melaksanakan peliputan, dokumentasi dan pelayanan informasi publik dan Mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, menyusun dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi public di Kabupaten;
- b. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan opini dan aspirasi public dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi public di Kabupaten ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi public di Kabupaten ;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data serta dokumentasi dalam rangka penyajian materi informasi ;
- e. Pengawasan dan pembuatan materi informasi media luar ruang ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Publik terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Informasi

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi ;
- b. Mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi untuk digunakan sebagai bahan penyajian informasi ;
- c. Menyajikan informasi kepada masyarakat melalui media tabloid dan berupa brosur, leaflet, pamphlet dan lain-lain ;
- d. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kajian Informasi

- a. Menyelenggarakan layanan monitoring isu public dan pendapat umum di media (media massa dan social) ;
- b. Menyelenggarakan pengolahan pengaduan masyarakat di Kabupaten ;
- c. Menghimpun, mengolah dan mengembangkan bahan-bahan informasa, pengaduan, masukan dari berbagai sumber dan atau media untuk diteruskan kepada unit kerja terkait dalam rangka penguatan informasi ;
- d. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kajian informasi public ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pelayanan Informasi Dokumentasi

- a. Menyelenggarakan pelayanan informasi public serta layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten sebagai implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi public ;
- b. Menyiapkan, menginventarisasi informasi potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi daerah ;
- c. Menyelenggarakan pengawasan pembuatan materi informasi dan pemasangan media luar ruang dalam bentuk billboard/baliho, spanduk, poster baik iklan maupun non iklan ;
- d. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi dan dokumentasi ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Teknologi Informasi dan Persandian ;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik Suplemen yang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen ang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government ;
- d. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Sarana Perangkat Keras dan Sistem Pengamanan Informasi ;
- e. Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian terdiri dari :

Seksi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak

- a. Menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi antar SKPD ;
- b. Menyelenggarakan layanan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi ;
- c. Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis Sistem Informasi ;
- d. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak ;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.

1) Seksi Pengembangan Sarana Perangkat Keras

- a. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) ;
- b. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika, *Government Cloud Computing* ;
- c. Menyelenggarakan Pengelolaan Layanan intranet dan internet Jaringan Pemerintah dan Publik dalam hal Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas TIK ;
- d. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pengembangan Sarana Perangkat Keras ;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.

2) Seksi Sandi dan Keamanan Informasi

- a. Menyelenggarakan Layanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi ;
- b. Menyelenggarakan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah ;
- c. Menerima, mengirim dan menyampaikan berita, sandi dan telekomunikasi serta facsimile ;
- d. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Sandi dan Keamanan Informasi ;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.

5. BIDANG STATISTIK DAN PEMBERDAYAAN TIK

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.

- a. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.
- b. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyediaan data dan informasi Statistik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik Dan Pemberdayaan Tik terdiri dari :

1. Seksi Data dan Statistik Sektor

- a. Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan serta Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.
- b. Menyelenggarakan layanan *recovery* data dan informasi serta layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
- c. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
- d. Melaksanakankoordinasi dan kerjasama penyusunan, publikasi data, pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi statistik daerah.
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.

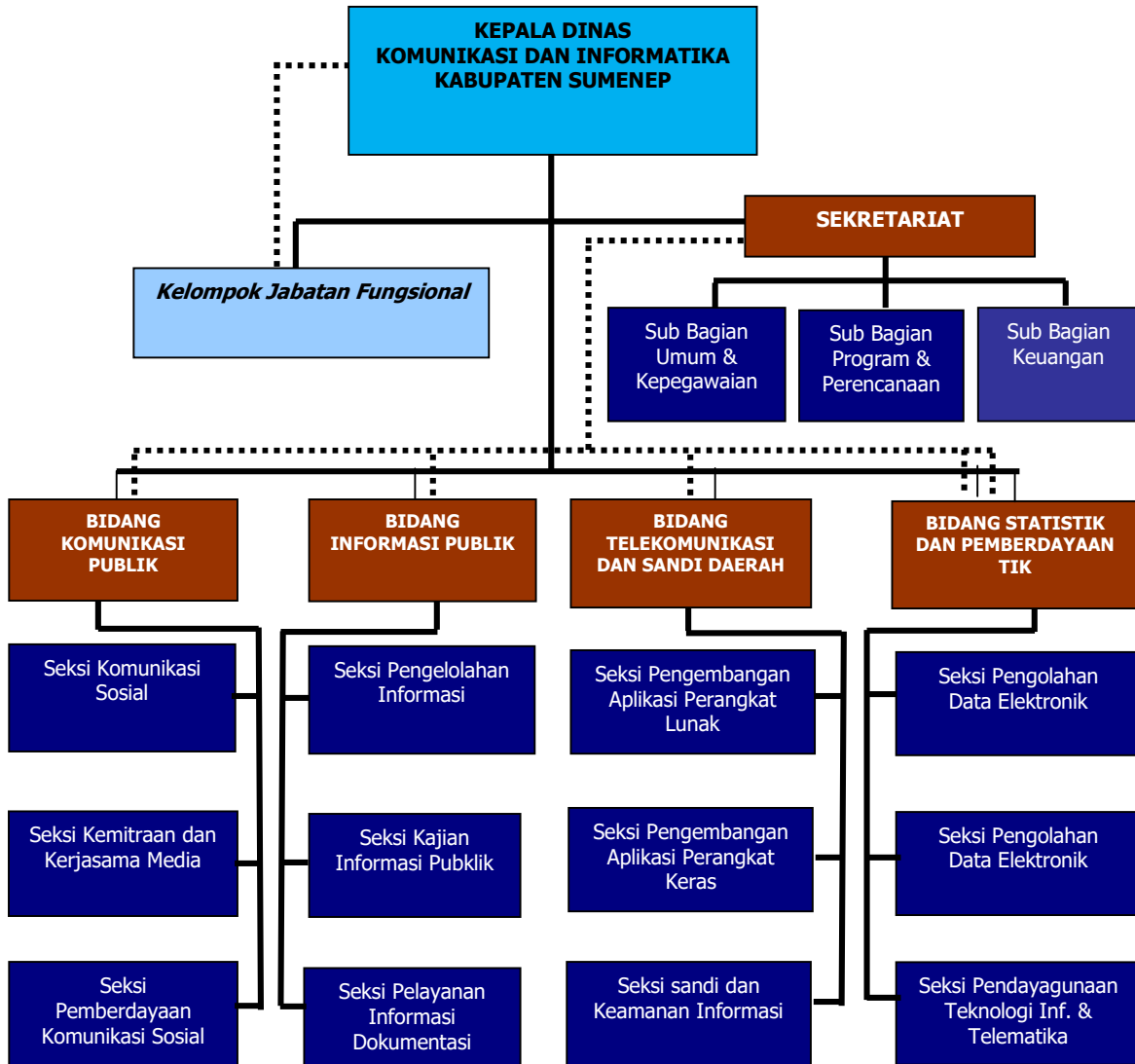
2. Seksi Pemberdayaan TIK Pemerintah

- a. Menyelenggarakan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*) dan Sistem Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah.
- b. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain dan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten.
- c. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi, Promosi pemanfaatan layanan dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government dan Smart City*, layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah.
- d. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.

3. SeksiPemberdayaan TIK Masyarakat

- a. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis, Workshop dan Edukasi secara terstruktur dan terpadu dalam rangka sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi ke Masyarakat.
- b. MenyelenggarakanSistem Informasi *Smart City*, Layananinteraktif Masyarakat dan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government dan SmartCity*.
- c. Menyelenggarakan Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika dilingkungan masyarakat.
- d. menyiapkan bahansosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakatdan menyusun pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika bagi masyarakat.
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



———— = Garis Komando
 = Garis Koordinasi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kebijakan umum pembangunan dibidang Teknologi Informasi yang Berbasis Elektronik dan Komunikasi yang difokuskan untuk mewujudkan masyarakat informasi berbasis Elektronik (SPBE) menuju Kabupaten Smart City.

Hal ini suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Sumenep. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang kuat dan profesional, serta penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memadai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang terletak di desa Pabian atau tepatnya di Jl. KH. Mansur No. 71 Sumenep kode pos 694111 telp. (0328) 662935 fax. (0328) 663984. Pada tahun 2018, memiliki 63 karyawan dengan rincian PNS sebanyak 63 orang dan 1orang PTT terdiri dari **Laki – Laki 43** Orang dan **Perempuan 20 Orang**.

Jumlah Karyawan	Eselon	Kepangkatan	Pendidikan	Umur
1	II	IV/c	S2	50
5	III	IV/b	S2	47 - 51
14	IV	III/d	SMA	48 - 56
43	STAF	I/b, II/b, III/a,b,c,d	SD - SMA	35 - 57
1	PTT	-	SLB	30 - 45

Dilihat dari latar belakang pendidikannya 1% S3 11% S2, 10% S1, 2% D3, 70% SLTA, 2% SMP/SLTP dan 5% SD.

Dilihat dari kualitas sumber daya aparatur yang ada, dengan latar belakang pendidikan SLTA adalah paling besar yaitu 70 %, kondisi ini menunjukkan kurangnya sumber daya aparatur tenaga ahli berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai sebanyak 63 orang, dirasa masih kurang memadai terutama skil yang dimiliki dalam pengembangan SDM nya dibandingkan dengan volume beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan/perengkapan kantor lainnya. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berupa gedung dan bangunan pendukung serta sarana pendukung untuk operasional. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Daftar Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Gedung Kantor	2 unit	Baik	ada
2.	Mobil Kepala Dinas Dan Operasional	9 unit	Baik	ada
3.	Kendaraan Operasional	32 unit	Baik 29 Mobil Rusak 3 unit	ada
4.	Mesin Genset	4 unit	Baik	ada
5.	Mobil Film M-PLIK	1 unit	Baik	ada

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	3	Ada
2	PERALATAN DAN MESIN		
	A. alat - alat Berat	4	Baik
	B. Alat - Alat Angkutan	46	Baik
	C. Alat - alat Bengkel dan alat ukur	4	Baik
	D. Alat -alat kantor dan Rumah Tangga	2210	Baik
	E. Alat -alat Studio dan Komunikasi	393	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku Perpustakaan	120	Baik

2.2.3 Pemasalahan dan Solusi

- a. **Permasalahan** yang ada di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah pada kurang Optimalnya pengelolaan Simral Pemerintah Daerah, adanya kesenjangan dalam kehidupan digital antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan, keterbukaan informasi publik dan sosialisasi hasil

pembangunan belum berkembang secara optimal, dan peran serta media massa dalam mensosialisasikan hasil pembangunan belum di konsultasikan secara menyeluruh (optimal).

- b. Solusinya** Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan terutama pelaksana teknis kegiatan dan SDM yang mumpuni untuk melaksanakan semua program kerja yang sudah ada sesuai dengan Tupoksinya masing-masing, terutama di intern Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, dalam menjalankan misi Bapak Bupati terutama misi yang ke IV dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap komunikasi dan informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung oleh SDM yang handal untuk menunjang program kerja Diskominfo dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan menuju Kabupaten yang berbasis IT/ Kabupaten (Smart City).

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang dimaksud dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah” ***Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan urusan bidang komunikasi dan informatika***”. Dalam kurun waktu Satu (1) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara sistematis dan berkisanumbungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal ditahun 2016 – 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan suatu organisasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumenep di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Daerah. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dari perfektif organisasi mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yang bersifat strategik. Lingkungan strategik yang dimaksud adalah berupa lingkungan :

Faktor Internal kondisi faktor internal menggambarkan bahwa Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menimbulkan kepedulian setiap orang untuk tahu, memahami, membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka.

Menggambarkan bahwa Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menimbulkan kepedulian setiap orang untuk tahu, memahami, membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep telah mengantisipasinya dengan menetapkan Visi Misi Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

”SUPER MANTAP”

yaitu ***”Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”***.

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Komunikasi dan Informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep diarahkan untuk meningkatkan kepedulian setiap orang untuk tahu, memahami, membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka.

Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam hubungan ini mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam sektor Komunikasi dan Informasi sehingga masyarakat memiliki budaya yang komunikatif dan informatif, dengan mendasarkan pada pengelolaan data dan informasi yang akurat dan terkini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya demi terwujudnya Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan **“SUPER MANTAP”** seperti dimaksud diatas, telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020 terutama misi yang ke IV adalah sebagai berikut :

“Misi Keempat, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”.

Tata Pemerintahan yang baik (Good- Governence) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stekholder baik dari aparat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Setiap aparat pemerintah

harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Disamping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tidak Pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Pada dasarnya, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah penyesuaian dari kebijakan yang telah ditetapkan Daerah dalam mengimplementasikan program daerah sebagai payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas maka yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika adalah melalui strategi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengembangan Teknologi Informasi.

Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab.

Setiap Aparatur Negara harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya.

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

- B.1 Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi;
- B.2 Mengoptimalkan Data Statistik Daerah;
- B.3 Mengembangkan Persandian Daerah;

Dengan segenap potensi sumberdaya alam dan SDM nya di Kabupaten Sumenep masih banyak kekurangan-kekurangan terutama pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Kualitas pelayanan komunikasi dan informasi yang berada dikepulauan masih minim karena kurangnya Jaringan yang terkoneksi dengan internet sehingga pembangunan yang terfokus dikepulauan kurang maksimal dilaksanakan, jaringan listrik dan komunikasi lewat IT atau jaringan Internet yang lemot atau blank sport.
2. Terbatasnya SDM pada Dinas Kominfo dalam dunia tehknologi Informatika merupakan kendala tersendiri dalam pengembangan informasi dan tehknologi IT.
3. Seiring perkembangan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan yang semakin pesat seharusnya diiringi dengan perkembangan tehknologi yang semakin canggih untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor. 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020, dimana arah kebijakan umum pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berbasis Elektronik (SPBE) difokuskan untuk mewujudkan Layanan Pemerintahan atau layanan Online, serta layanan internet gratis dan atau murah dalam menunjang informasi pelayanan publik menuju kota Smart City. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN TH. 2018
						URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
1	Meningkatkan sistem komunikasi, informasi dan media massa di Kabupaten Sumenep	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	25200	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Reformasi Birokrasi	3.300	Pengembangan Jaringan G-Online	Jumlah Jaringan G-Online yang sudah terealisasi	1 line	1.469.250.000
				Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan e - Gov	60				Peningkatan Kinerja PDE	Jumlah OPD yang sudah terhubung internet	66 OPD	1.160.064.900
				Jumlah Perangkat Daerah menerapkan pemanfaatan E-Government untuk mendukung inovasi layanan publik	60				Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi	Jumlah Data Informasi pembangunan Daerah yang sudah terealisasi	12 bendel kliping; 12 album foto; 4 DVD;	370.000.000
				Jumlah Web Site Pemerintah Daerah	1 line				Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	Jumlah Jaringan Internet yang ada di Kabupaten Sumenep	1 line	1.144.874.100
				Jumlah media informasi Kabupaten Sumenep	8				Pembangunan Sarana Pendukung Informasi Kepulauan	Jumlah sarana kepulauan yang sudah dilaksanakan	2 kegiatan	331.755.237

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN TH. 2018
						URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
									Pengembangan Telecenter	Jumlah telecenter yang sudah terkoneksi internet	2 unit	213.385.000
									Penerbitan Tabloid	Jumlah Tabloit Kominfo yang sudah tersebar ke masyarakat	72000 exemplar	150.392.500
									Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi dengan Media	Jumlah Sosialisasi dengan Media massa	30 kegiatan	136.070.000
									Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Pertura	Jumlah Informasi daerah yang sudah dilaksanakan melalui pameran dan pertura	2 kali	341.700.000
									Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Siaran Radio	Jumlah Informasi Daerah yang sudah tersebar melalui siaran Radio	360 hari	335.000.000
									Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kinerja News Room	Jumlah Informasi Daerah yang tersebar melalui kinerja newsroom	2500 exemplar	2.358.654.100

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN TH. 2018
						URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
									Penyebarluasan Informasi melalui Penyelenggaraan Penerangan Mobile	Informasi daerah yang sudah dilaksanakan melalui penerangan mobile keliling	60 kali	205.350.000
									Penyebarluasan Informasi Melalui Pentas Hiburan dan Informasi	Jumlah informasi daerah yang sudah terlaksana melalui pentas hiburan	5 kali	65.515.720
									Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang	Jumlah informasi pembangunan daerah melalui media luar ruang	15 kali	30.819.000
									Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah permintaan informasi publik yang sudah terealisasi	5 dokumen	18.640.000
									Peningkatan Kinerja PPID	Jumlah sengketa publik yang sudah terselesaikan	5 sengketa informasi	76.184.700
						Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Data hasil pembangunan yang sudah di publikasikan	105	Koordinasi, Pengumpulan Data dan Penggandaan Statistik Daerah	Jumlah data Kabupaten dan Kecamatan dalam angka yang sudah terdistribusikan	110exemplar	226.172.000

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	SASARAN PROGRAM			SASARAN KEGIATAN			ANGGARAN TH. 2018
						URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
						Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase Peningkatan Keamanan system informasi	500	Peningkatan Kesadaran Informasi	Jumlah informasi daerah yang sudah diamankan oleh sandiman	510	162.455.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai Amanat Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggung jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 s/d 100 : **Sangat Berhasil**
- 70 s/d < 85 : **Berhasil**
- 55 s/d < 70 : **Cukup Berhasil**
- 0 s/d < 55 : **Kurang Berhasil**

A. CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO

Laporan Kinerja ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 maupun RKPD Tahun 2018. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumenep sesuai urutan Misi Tujuan dan Sasaran dapat disimpulkan capaian kinerja diatas dari Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar **Rp. 10.015.480.505** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.646.929.761** atau **96.32%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian (**Sangat Berhasil**), capaian dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Hasil Penilaian Capaian Kinerja Diskominfo Tahun 2018 Kabupaten Sumenep

Uraian	Rata-rata Capaian Indikator	Keterangan
MISI KE IV :		
Sasaran. 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemda		
1.1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	96.00%	Sangat Berhasil
1.2. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	99.00%	Sangat Berhasil
1.3. Program kerjasama informasi dan media massa	96.00%	Sangat Berhasil

Untuk lebih jelasnya analisis capaian kinerja setiap pernyataan kinerja terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pencapaian kinerja merupakan penyelenggaraan pemerintahan beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat perurusan sebagai berikut

2. **Urusan Komunikasi dan Informasi Kab. Sumenep.**

Pengukuran kinerja Urusan Informasi yang berkualitas merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu menghasilkan nilai rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 sebesar **96.00%**, ini termasuk predikat **Sangat Berhasil**.

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel : 1.1.
Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		
			Target	realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	orang	3.287	75000	2281.72%
	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan e -Gov	OPD	66	66	100%
	Jumlah Perangkat Daerah menerapkan pemanfaatan E-Government untuk mendukung inovasi layanan publik	OPD	66	66	100%
	Jumlah Web Site Pemerintah Daerah	Line	1	1	100%
	Jumlah media informasi Kabupaten Sumenep	Jumlah	8	8	100%

1.2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	REALISASI	
			Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	4	5	6
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	3.287	3300	75000
	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan e -Gov	66	66	66
	Jumlah Perangkat Daerah menerapkan pemanfaatan E-Government untuk mendukung inovasi layanan publik	66	11	66
	Jumlah Web Site Pemerintah Daerah	1	1	1
	Jumlah media informasi Kabupaten Sumenep	8	8	8

1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi

Tabel 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode
RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	REALISASI Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	4	5	6
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung Terhadap Website Pemda	3.287	75000	71.713
	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan E-Gov	60	66	6
	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pemanfaatan E-Government untuk mendukung inovasi layanan publik	60	66	6
	Jumlah Website Pemerintah Daerah	1	1	0
	Jumlah Media Informasi Kab. Sumenep	8	8	0

1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Tabel 1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	REALISASI Nasional	Keteerangan (+/-)
1	2	4	5	6
	NIHIL			

1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah tabloid Info

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Jumlah Tabloid Info yang tersebar ke seluruh instansi SKPD, Kecamatan dan kantor yang ada di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2017 Tabloid Info sebanyak 26.500 exemplar dari jumlah seluruh instansi pemerintah yang ada di kabupaten Sumenep sebanyak 100%, sedangkan target penerbitan tabloid info tahun 2018 sebanyak 72.000 explr atau mencapai 100%, dari jumlah yang diterbitkan mengalami peningkatan dikarenakan adanya kegiatan yang padat dalam penyebaran berita pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep sebagai sarana Informasi bagi masyarakat dengan nilai (**sangat berhasil**)

2. Jumlah Pameran Dan Pertura

Indikator ini menunjukkan Jumlah Pameran di Kabupaten Sumenep. Pada Tahun 2017 jumlah terealisasi sebanyak 1 kali dari yang ditargetkan sebanyak 1 kali pameran pembangunan atau capaian kinerja 100%, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pameran dan pertura mengalami perubahan atau terealisasi sebesar 100% . denga 2 kali kegiatan dengan nilai (**sangat berhasil**)

3. Jumlah Informasi daerah melalui siaran radio

Indikator ini pada Tahun 2017 Jumlah realisasi informasi daerah melalui siaran radio di Kabupaten Sumenep sebanyak 360 hari yang ditargetkan sebanyak 99.00% mencapai realisasi 100% . Dengan begitu, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 bulan sehingga terakumulasi menjadi satu tahun. Kegiatan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan atau dibilang tetap dengan target dan realiasi tahun 2018 adalah sebesar 100% atau bisa dibilang (**sangat berhasil**)

4. Jumlah Informasi Daerah melalui kinerja News room

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi pembangunan melalui kinerja newsroom dengan informasi yang selalu terupdate melalui media online dengan target tahun 2017 sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2018 target realisasinya sebesar 100% ada perubahan dari tahun sebelumnya atau bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

5. Jumlah Informasi Daerah melalui Penerangan Mobile

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi pembangunan melalui Siaran Keliling dari kecamatan ke kecamatan dengan informasi yang selalu terupdate melalui siaran mobile keliling dengan target tahun 2017 sebesar 99.00%, dengan 60 kali kegiatan sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 60 dan terealisasi sebesar 70 kali atau 110% atau bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

6. Jumlah Informasi Daerah melalui Pariwara dan Advertorial Media Cetak

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi pembangunan melalui Advertorial media cetak baik lokal maupun Nasional dari target tahun 2017 sebesar 75%, dengan 30 media yang masuk realisasi sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 35 media dan terealisasi sebesar 100% atau bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

7. Jumlah Informasi Daerah melalui Pentas Hiburan

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi pembangunan melalui Pentas Hiburan ke masyarakat dari target tahun 2017 sebesar 75%, dengan

3kali realisasi sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 5 kali dan terealisasi sebesar 100% atau bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

8. Persentase Data hasil Pembangunan yang sudah di Publikasikan

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi pembangunan melalui Data Statistik dalam Angka Kabupaten Sumenep dalam melayani permintaan informasi publik dari target tahun 2017 target sebesar 150 dan terealisasi sebesar 99.00% dan apada tahun 2018 denagan target sebesar 160 atau sebesar 100% bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

9. Persentase Data Persandian Daerah yang sudah diamankan

Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan keamanan sistem informasi daerah untuk tahun 2017 target sebesar 2 dan terealisasi sebesar 94,41% dan pada tahun 2018 taeket sebesar 95 terealisasi 100% atau bisa dikatakan (**sangat berhasil**)

10. Jumlah Pengunjung Website Daerah

Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Jumlah Pengunjung Website daerah guna meningkatkan informasi pelayanan publik dari tahun 2017 mencapai 21600 orang pengunjung sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengunjung website daerah mencapai 75000 orang atau 3472% ada peningkatan sangat tajam dari tahun yang lalu dengan nilai (**sangat berhasil**).

Dengan adanya penyajian Analisis data kinerja diatas bisa disimpulkan bahwa dari tahun kinerja 2017 sampai dengan tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan target kinerja mengalami **peningkatan** atau **keberhasilan** dalam melaksanakan Visi Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2016-2020 dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra tahun berjalan mengalami peningkatan kinerja dengan hasil sesuai dengan target dan peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya, dengan harapan ditahun – tahun berikutnya target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra bisa terlaksana dengan baik terutama untuk pelayanan Komunikasi dan Informasi Ppublik yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Sumenep.

1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Cost Per Outcome :

1) Alokasi Persasaran Pembangunan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	%
	Strategis			Anggaran
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung Terhadap Website Pemda	1.160.064.900	99.00
		Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan E-Gov	1.144.874.100	99.00
		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pemanfaatan E-Government untuk mendukung inovasi layanan publik	1.469.250.000	93.00
		Jumlah Media Informasi Kab. Sumenep	150.392.500	96.00

2) Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	85	85	100	4.825.399.237	4.655.113.108	96.00%
Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							
Mengembangkan sistem informasi keamanan Daerah	Persentase persandian daerah yang sudah diamankan	85	85	100	162.455.500	153.861.394	95.00%
Program: Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi							
Melaksanakan kerjasama informasi dengan media massa	Persentase media informasi yang dimanfaatkan	85	85	100	4.109.804.443	3.926.723.625	96.00%
Program: Kerjasama Informasi dan Media Massa							

3) Efisiensi Penggunaan sumber Daya Tahun 2018

Sasaran/Program	Indikator	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	5	8	8
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100	96	40
Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				

Mengembangkan sistem informasi keamanan Daerah Program: Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Persentase persandian daerah yang sudah diamankan	100	95	50
Melaksanakan kerjasama informasi dengan media massa Program: Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase media informasi yang dimanfaatkan	100	96	40

1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bisa dijelaskan sebagai berikut:

2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dengan sasaran meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 96.00% didukung oleh kegiatan (output) berupa :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyajian informasi dengan melaksanakan pembuatan kliping informasi pembangunan kabupaten Sumenep sebanyak 12 bendel, 12 album photo dan 4 keping dvd terealisasi dengan baik sebesar 100%
- b. Peningkatan Komunikasi dan koordinasi dengan media massa sebanyak 30 kegiatan berupa koordinasi dengan seluruh mas media yang ada dikabupaten Sumenep semuanya terealisasi dengan baik atau sebesar 100%.
- c. Pengembangan Telecenter baik yang berada dikepulauan maupun didaratan yang berjumlah 2 unit dengan kegiatan pelatihan dan bintek komputer sebanyak 3 kali semuanya terealisasi dengan baik sebanyak 3kali kegiatan atau sebesar 100%
- d. Peningkatan kinerja PDE (Pengelolaan Data Elektronik) adalah kegiatan yang mengelolah data informasi pembangunan sebelum diinformasikan kemasyarakat melalui webside kabupaten Sumenep melalui masing – masing OPD yang sudah terhubung ke web Kabupaten Sumenep dengan 66 OPD semuanya terealisasikan 100%.
- e. Penyediaan Jasa Komunikasi Internet adalah kegiatan yang menyediaan jasa internet(web) melalui Website Kabupaten Sumenep di www.sumenepkab.go.id, www.ppid.sumenepkab.go.id dan www.diskominfosumenepkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam

- menginformasikan semua kegiatan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep melalui 1 line semuanya bisa terealisasi dengan baik atau sebesar 100%.
- f. Pengembangan Jaringan G-Online dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai ujung tombak kabupaten Sumenep dalam menginformasikan informasi pembangunan daerah secara cepat, tepat dan akuntabel harus didukung dengan pengembangan jaringan dan inovasi yang lebih luas dengan terhubungnya semua OPD ke satu server maka pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa cepat teratasi dengan realisasi sebesar 100%.

3. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi

Mengembangkan sistem informasi keamanan Daerah kabupaten Sumenep dengan adanya perubahan SO yang baru sekarang dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dengan indikator kegiatan persentase persandian daerah yang sudah diamankan dengan target 500 surat masuk dan terealisasi sebesar 100%.

4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Melaksanakan kerjasama informasi dengan media massa tidak bisa lepas dari Dinas Komunikasi dan Informatika karena terkait dengan Informasi Pembangunan Daerah dengan media dengan Indikator ***Persentase media informasi yang dimanfaatkan baik oleh mas media maupun masyarakat*** yang membutuhkan dengan kegiatan antara lain :

- a. Penerbitan Tabloid kominfo kegiatan ini adalah mencetak tabloid Kominfo berupa berita pembangunan daerah kemudian didistribusikan ke Badan/Dinas/Kantor dan pondok pesantren yang ada di kabupaten Sumenep dari target sebesar 72000exemplar terealisasi sebesar 72000exemplar atau 100%.
- b. Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Pertura kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep menampilkan produk-produk unggulan masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan diikuti oleh semua OPD Sekabupaten Sumenep serta pameran pekan keraton adat asean FKMA dengan target 2 kali kegiatan terealisasi sebesar 100%.
- c. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui siaran radio RGS dengan target sebesar 360 hari terealisasi sebesar 360 hari atau sebesar 100%.

- d. Penyebar luasan Informasi Daerah melalui peningkatan Kinerja News Room kegiatan ini adalah peliputan informasi pembangunan Daerah melalui News Room dengan berita – berita yang ter Up Date dengan didukung oleh petugas reporter yang handal sehingga berita atau informasi yang diorbitkan enak dibaca dan difahami oleh masyarakat dengan target 2500exemplar semuanya dapat terealisasikan sebesar 100%.
- e. Penyebar luasan Informasi Daerah melalui penyelenggaraan penerangan mobile dikegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas penerangan informasi melalui siaran mobile keliling dari target yang ditentukan sebanyak 60 kali dapat terealisasikan sebanyak 60 kali atau 100%.
- f. Penyebar luasan Informasi Daerah melalui Pentas hiburan dan Informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pentas hiburan yang didalamnya diselingi informasi-informasi pembangunan daerah melalui pentas seni atau ludruk kegiatan ini ditargetkan sebanyak 5 kali kegiatan dengan realisasi sebanyak 5 kali atau 100%.
- g. Koordinasi pengumpulan Data dan Penggandaan Statistik daerah dikegiatan ini karena baru dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan SO kegiatan ini dilaksanakan dengan target sebesar 150 buku Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka yang bisa terealisasikan sebesar 150 buku yang disebar ke Dinas/Kantor dan kecamatan dalam Kabupaten sumenep dengan realisasi sebesar 100%.

Dengan adanya keterangan diatas bisa diartikan bahwa semua Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 dengan capaian outcome yang rata-rata 100% atau tercapai semua sehingga sampai saat ini belum ada kegiatan yang tidak mencapai target, dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 bisa dikatakan **(berhasil) dalam memenuhi target yang telah ditentukan** semoga kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep bisa lebih baik lagi.

B. REALISASI ANGGARAN :

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	85	85	100	1.144.874.100	1.138.008.000	99.00%
Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							
Mengembangkan sistem informasi keamanan Daerah	Persentase persandian daerah yang sudah diamankan	85	85	100	162.455.500	153.012.300	39.00%
Program: Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi							
Melaksanakan kerjasama informasi dengan media massa	Persentase media informasi yang dimanfaatkan	85	85	100	2.358.654.100	2.352.828.200	100%
Program: Kerjasama Informasi dan Media Massa							

KODE PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	SESUDAH PERUBAHAN	Realisasi	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		445.426.000	439.710.428	9872%
	1.16.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 line telp. & fax.; 1 th. listrik & air bersih	99.300.000	101.263.578	102
	1.16.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	9 unit R4; 48 unit R2	90.000.000	82.715.278	92
	1.16.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 org; 12 bulan; 12 jenis	25.000.000	25.000.000	100
	1.16.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	31 jenis	23.000.000	23.000.000	100
	1.16.01.01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis; 12.500 lembar	13.000.000	13.000.000	100
	1.16.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 komponen	10.000.000	10.000.000	100
	1.16.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14 media cetak	25.626.000	25.626.000	100
	1.16.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	15.000.000	15.000.000	100
	1.16.01.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45 kali	120.000.000	119.605.572	100
	1.16.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	136 kali	24.500.000	24.500.000	100
1.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		358.969.150	352.822.850	9829%

	1.16.01.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 jenis	34.631.750	30.985.850	89
	1.16.01.02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	1 tahun	4.875.000	4.875.000	100
	1.16.01.02.11.	Pengadaan Komputer	0	234.462.400	231.962.000	99
	1.16.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	50.000.000	50.000.000	100
	1.16.01.02.30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	1 tahun	15.000.000	15.000.000	100
	1.16.01.02.31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	1 tahun	10.000.000	10.000.000	100
	1.16.01.02.32.	Pemeliharaan Rutin Jaringan Air, Listrik dan Telepon	1 tahun	10.000.000	10.000.000	100
1.16.01.03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		95.861.725	95.382.750	100
	1.16.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	110stel khaki, 110stel batik, dan 110stel OR	95.861.725	95.382.750	100
1.16.01.05.		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		4.365.450	3.075.000	70
	1.16.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 org	4.365.450	3.075.000	70
1.16.01.06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		42.360.000	41.756.000	99
	1.16.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 paket	42.360.000	41.756.000	99
1.16.01.15.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		4.825.399.237	4.655.113.108	96
	1.16.01.15.08.	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi	12 bendel klipng; 12 album foto; 4 DVD;	370.000.000	361.506.300	98
	1.16.01.15.09.	Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi dengan Media	30 kegiatan	136.070.000	134.250.000	99
	1.16.01.15.10.	Pengembangan Telecenter	4 unit	213.385.000	207.447.250	97
	1.16.01.15.12.	Peningkatan Kinerja PDE dan Jaringan G-Online	40 SKPD	1.160.064.900	1.153.491.667	99
	1.16.01.15.14.	Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	1 line	1.144.874.100	1.138.008.000	99
	1.16.01.15.22.	Pembangunan Sarana Pendukung Informasi kepulauan	1 paket	331.755.237	290.487.287	88
	1.16.01.15.25.	Pengembangan Jaringan G-Online	1 line	1.469.250.000	1.369.922.604	93
1.16.01.17.		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		133.294.500	132.346.000	99
	1.16.01.17.06.	Bimbingan Teknis Internet	15 kegiatan	103.894.500	102.946.000	99
	1.16.01.17.12.	Lomba Cerdik Cermat KIM (LCCK)	3 kegiatan	29.400.000	29.400.000	100

BAB IV PENUTUP

Atas Berkat, Rahmat dan Ridho Allah SWT, dengan seluruh dukungan dari seluruh pihak, partisipasi serta bantuan masyarakat maupun swasta dalam mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Meskipun terdapat beberapa target capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan, namun secara umum apa yang diinginkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan Visi Misi Bapak Bupati Dan Wakil Bupati terpilih dengan Visinya **“SUPERMANTAP”** dengan visi **“Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil Dan Profesional”** seperti ditegaskan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016- 2020 secara bertahap dapat dicapai.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerja pemerintahan telah berjalan secara baik dan lancar tanpa adanya suatu hambatan dan kendala. Kendala/hambatan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan. Berkat bantuan semua *stakeholders* dan dilandasi oleh semangat, kerja keras, serta etos kerja untuk membangun, maka berbagai permasalahan yang ada akan dapat diatasi.

Akhirnya semoga laporan ini dapat menjadi bahan /informasi bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Semoga pada tahun mendatang kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan melalui cerminan capaian serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat, maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 akan selalu kami pantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terus-menerus sehingga tidak berhenti dalam tataran kebijakan formal saja, tetapi menjadi program dan kegiatan yang menjadial dan tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan dan lebih utamanya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Harapan kami dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep ini, bukan hanya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah menjadi komitmen di Tahun 2018, namun dapat mencerminkan pula keselarasan dan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya mencerminkan secara utuh penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Buku laporan pelaksanaan program / kegiatan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mencakup prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, visi dan misi, target kinerja yang ingin dicapai sebagai indikator keberhasilan, realisasi kinerja sesuai indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2020 atau Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat untuk penyusunan “Buku Pembangunan di Kabupaten Sumenep” sebagai bacaan publik dan sumber informasi bagi masyarakat terutama di Kabupaten Sumenep kedepan akan lebih baik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. MATRIK RENSTRA

B. PERJANJIAN KINERJA